

Nama : Nina Oktaviana

NPM : 2413031057

Kelas : B

Studi Kasus Teori Akuntansi

Pertanyaan:

1. Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran.

Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia?

Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.

2. Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:

- ☐ Tujuan laporan keuangan
- ☐ Karakteristik kualitatif informasi
- ☐ Basis pengukuran
- ☐ Asumsi entitas dan kelangsungan usaha

3. Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual

IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis,

mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.

Jawaban:

1. Ini dapat dibenarkan dari segi akuntansi atau konseptual jika penilaian nilai wajar dapat dibuktikan secara kuat (pengukuran yang solid, bukti pasar, penilai yang independen, pengungkapan yang komprehensif). Namun, jika pasar dalam negeri untuk pesawat tidak aktif, sehingga nilai yang dipakai bergantung pada asumsi yang tidak dapat diamati (Level 3) maka auditor berhak untuk meminta penggunaan pendekatan yang lebih hati-hati (misalnya biaya historis) atau paling tidak memerlukan pengungkapan dan bukti tambahan.

Penjelasan lengkap, dengan mengacu pada standar:

Dasar dari standar: PSAK (Indonesia) telah mengadopsi kerangka konseptual yang konsisten dengan IFRS/Conceptual Framework; pengukuran nilai wajar tertuang dalam PSAK 68 (yang mengadopsi IFRS 13). Secara prinsip, revaluasi terhadap nilai wajar untuk aset tetap (seperti pesawat) diperbolehkan (model revaluasi) tetapi hanya dapat dilakukan jika nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. (lihat ringkasan/adopsi KKPK/PSAK).

Syarat untuk revaluasi (IAS/PSAK 16): IAS/PSAK 16 memperkenankan penerapan model revaluasi, tetapi mewajibkan bahwa pengukuran harus andal dan diterapkan terhadap semua kelompok aset sejenis; revaluasi harus dilakukan secara berkala agar nilai tercatat tidak berbeda secara material dari nilai wajar di akhir periode. Jika pengukuran tidak dapat dilakukan secara andal, maka harus digunakan model biaya (historical cost). Hal ini menjelaskan alasan auditor yang menunjukkan keterbatasan pasar domestik.

Pengukuran nilai wajar dan hirarki input: IFRS 13 / PSAK 68 menyediakan kerangka kerja untuk pengukuran (definisi nilai wajar, teknik penilaian, hirarki Level 1/2/3). Bila pasar domestik kurang aktif, penilaian akan cenderung bergantung pada input yang tidak dapat diamati (Level 3) yang membuatnya lebih subjektif, serta memerlukan pengujian sensitivitas dan pengungkapan. Auditor berhak meminta bukti (contohnya transaksi pasar internasional, model DCF yang solid, penilai independen, serta sensitivitas).

Argumen manajemen (substansi lebih diutamakan daripada bentuk dan investor asing): IFRS memang menekankan representasi yang setia/substansi (substansi lebih penting daripada bentuk) serta relevansi bagi pengguna global; IFRS 13 juga memperkenankan mempertimbangkan pelaku pasar di pasar yang paling relevan (pasar utama/pasar yang paling menguntungkan) — artinya, untuk pesawat (pasar jual-beli sekunder sering bersifat internasional), menggunakan harga pasar global dapat diterima secara konseptual. Namun, penerapan harus dilakukan dengan transparan: penyesuaian untuk kondisi Indonesia (biaya repositioning, registrasi, kepatuhan, pajak, serta permintaan domestik) harus diungkapkan.

Praktik terbaik / rekomendasi bagi perusahaan untuk mempertahankan penggunaan nilai wajar:

1. Gunakan jasa penilai eksternal yang berpengalaman dalam pasar pesawat internasional; catat metode yang digunakan (pendekatan pasar, DCF, penyesuaian).
2. Jelaskan pasar yang dijadikan rujukan (misalnya pasar Eropa/Amerika/Asia) serta penyesuaian untuk konteks Indonesia. (IFRS 13 mengharuskan pengungkapan teknik dan asumsi).
3. Tunjukkan sensitivitas penilaian (rentang nilai), serta sertakan rekonsiliasi ke biaya historis.
4. Pastikan kebijakan akuntansi diterapkan per kelas aset (PSAK/IAS 16 mengharuskan ini).
5. Lakukan komunikasi proaktif dengan auditor dan regulator (OJK/BEI jika terdaftar) — jika auditor tetap menolak, sediakan perbandingan (laporan biaya historis dalam catatan) atau pertimbangkan model hibrida sementara.

2. Perbandingan Kerangka Konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS

PSAK	IFRS
a. Tujuan Laporan: IFRS (Kerangka Konseptual): Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Memfokuskan pada pengambilan keputusan ekonomi, termasuk evaluasi proyeksi arus kas di masa mendatang. Juga mengutamakan tanggung jawab manajemen. Bersifat internasional untuk memenuhi kebutuhan pasar modal global.	a. Tujuan Laporan: PSAK (Kerangka Konseptual Indonesia): Tujuan utamanya serupa, yaitu memberikan informasi keuangan kepada pengguna eksternal. Menambahkan penekanan pada kepentingan nasional, seperti pemangku kebijakan dan pemerintah. Mengadopsi IFRS, namun tetap memperhatikan karakteristik ekonomi dan peraturan lokal.
b. Karakteristik Kualitas Informasi Memiliki dua karakteristik utama: Relevansi dan Penyajian yang Andal. Karakteristik tambahan: Perbandingan, Verifikasi, Ketepatan Waktu, Kemudahan Memahami. Menekankan pada prinsip substansi lebih penting dari bentuk	b. Karakteristik Kualitas Informasi Menggunakan karakteristik yang sama dari IFRS. Dalam praktik, PSAK terkadang lebih menekankan kehati-hatian agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik. Memberikan ruang untuk interpretasi dalam konteks Indonesia (seperti materialitas dan tingkat keandalan informasi).
c. Dasar Pengukuran (Measurement Bases) Mengakui berbagai basis pengukuran: biaya historis, biaya saat ini, nilai yang dapat direalisasikan/pembayaran, nilai sekarang, nilai wajar. Pemilihan basis didasarkan pada mana yang paling relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. IFRS 13 mengatur kerangka pengukuran nilai tingkat 1 sampai 3	c. Dasar Pengukuran (Measurement Bases) Mengikuti prinsip yang sama, contohnya PSAK 68 (nilai wajar) sejalan dengan IFRS 13. PSAK 16 (aset tetap) memungkinkan penggunaan model biaya atau model revaluasi (nilai wajar) asalkan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, penerapan nilai wajar di Indonesia lebih berhati-hati karena pasar tidak selalu aktif.

d Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha IFRS: Menggunakan konsep entitas pelapor yang terpisah dari pemilik. Mengasumsikan kelangsungan usaha kecuali ada bukti yang bertentangan. Berguna untuk memastikan laporan keuangan relevan bagi pengambilan keputusan jangka panjang.	d. Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha PSAK: Mengikuti asumsi tentang entitas dan kelangsungan usaha sama dengan IFRS. Dalam implementasinya, PSAK juga menjajaki kebutuhan regulasi lokal (seperti ketentuan OJK, perpajakan, atau standar sektor tertentu).
---	--

3. Tidak sepenuhnya. Keselarasan dengan prinsip dasar sangat krusial dan membawa banyak keuntungan (perbandingan, akses terhadap modal internasional), namun perubahan yang bijak di tingkat lokal saat implementasi dan transisi sering kali dibutuhkan, melihat kondisi ekonomi, sosial, serta tingkat kematangan pasarnya di Indonesia.

Argumen mendukung konvergensi sempurna (mendukung IFRS):

Meningkatkan perbandingan bagi investor luar negeri → mempermudah dalam menilai serta kemungkinan masuknya modal dari luar.

Standar IFRS sudah diakui matang serta memiliki kerangka konseptual yang solid (mengurangi arbitrase dalam akuntansi antara wilayah hukum yang berbeda).

Alasan untuk terus mempertahankan beberapa penyesuaian lokal:

1. Kematangan pasar dan infrastruktur penilaian: banyak transaksi (contohnya aset yang rumit seperti pesawat, infrastruktur) diperdagangkan di kancah internasional; meskipun demikian, jika pelaksanaan penilaian dalam negeri bergantung pada Level 3 dan pasar penilaian di dalam negeri belum berkembang, hasilnya bisa jadi subjektif serta menyebabkan fluktuasi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi lokal. Regulasi serta penguatan pasar penilaian perlu dikembangkan bersamaan.
2. Kapasitas penyusun dan auditor: penerapan IFRS secara penuh memerlukan keterampilan dalam penilaian, auditor yang mampu, dan penilai independen — jika kapasitas ini belum merata, standar sepenuhnya IFRS dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau pengungkapan yang tidak memadai. Laporan perbandingan SAK–IFRS mengindikasikan adanya perbedaan dalam praktik implementasi yang perlu dikelola.
3. Dampak sosial dan ekonomi: akuntansi nilai wajar dapat menyebabkan fluktuasi pada laba/pemilik/penghasilan yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen, hubungan tenaga

kerja, maupun perhitungan pajak/regulasi. Pemerintah dan otoritas (seperti fiskal/pajak/prudensial) kadang membutuhkan dasar yang lebih stabil untuk kepentingan non-GAAP (seperti perpajakan).

4. Kebutuhan regulasi sektor tertentu: beberapa sektor (perbankan, asuransi, penerbangan) memerlukan interaksi antara standar akuntansi dan peraturan prudensial/operasional — penyesuaian lokal mungkin dibutuhkan untuk mencapai sinkronisasi.

Praktik yang lebih realistis:

Konvergensi penuh prinsip (adopsi konsep IFRS) ditambah penyesuaian lokal pada tahap pelaksanaan (pedoman, transisi, waktu, pengungkapan). Ini berarti: Indonesia tetap berpegang pada kerangka konseptual IFRS, tetapi memberikan panduan untuk pelaksanaan, fase transisi, dan penguatan kapasitas (penilai, auditor) sebelum mengharuskan penerapan penuh di semua entitas. Dokumen IAI dan penelitian oleh konsultan ternama (PwC/KPMG) mencerminkan pendekatan konvergensi ditambah pedoman lokal.

Saran praktis untuk Dewan Komisaris PT Garuda Sejahtera

1. Jangan menganggap isu ini sebagai pertarungan antara “IFRS dan PSAK” — saat ini, kedua kerangka tersebut sudah sangat mirip; masalah yang dihadapi adalah apakah nilai wajar dapat diukur dengan akurat untuk aset itu. PSAK memperbolehkan penggunaan nilai wajar jika dapat diandalkan.
2. Tindakan praktis yang disarankan oleh dewan: terima atau tolak nilai wajar berdasarkan bukti (seperti penilaian dari pihak ketiga, dokumentasi, dan sensitivitas). Jika memutuskan untuk menggunakan nilai wajar: buat nota yang sangat rinci (termasuk metode, pasar acuan, asumsi, serta sensitivitas, dan level hierarki). Jika auditor masih menolak, siapkan pengungkapan komparatif atau gunakan biaya historis untuk laporan di Indonesia, sambil menyajikan laporan tambahan untuk investor luar negeri.
3. Tingkatkan tata kelola: buat kebijakan revaluasi untuk setiap jenis aset, batasi penggunaan Level 3 kecuali ada tinjauan dari penilai independen, dan susun jadwal revaluasi yang realistis.